

KOICA



Save the Children



Circle Of  
Imagine  
CIS Timor  
Society



# DOKUMENTASI CERITA PERUBAHAN

## Project WE NEXUS:

Perempuan Berdaya untuk Perdamaian Berkelanjutan  
di Nusa Tenggara Timur



# **DOKUMENTASI** **CERITA PERUBAHAN**

## **Project WE NEXUS:**

Perempuan Berdaya untuk Perdamaian Berkelanjutan  
di Nusa Tenggara Timur

# DOKUMENTASI CERITA PERUBAHAN

## **Project WE NEXUS:**

Perempuan Berdaya untuk Perdamaian Berkelanjutan  
di Nusa Tenggara Timur

## **Penulis:**

Juliana S. Ndolu  
Gatrida Djukana

## **Kontributor:**

Imelda P. Dally  
Noldi TaduHungu  
Zarniel Woleka

## **Editor:**

Purba Wirastama  
Thomas Gustafian

## **Tata Letak:**

Agusto Bunga  
Thomas Gustafian

## **Disusun dan diterbitkan oleh:**

Yayasan CIS Timor Indonesia

Penerbitan ini merupakan bagian dari Program WE NEXUS yang dijalankan di tujuh desa di Nusa Tenggara Timur oleh Yayasan CIS Timor Indonesia, Save the Children Indonesia, dan UN Women. Program ini bertujuan untuk membangun ketangguhan masyarakat di wilayah yang memiliki risiko tumpang tindih antara konflik sosial dan bencana alam akibat krisis iklim. Program WE NEXUS didanai oleh Pemerintah Korea Selatan melalui KOICA dan telah dilaksanakan dari Agustus 2024 hingga Juni 2026.

**2026**

## Daftar Isi

<b>Daftar isi</b> .....	5
<b>Kata Pengantar</b> .....	6
<b>Tentang Program WE NEXUS dan Cerita-Cerita Ini</b> .....	7
1. Mama Anika, Pendamping Perempuan Penyintas Kekerasan .....	8
2. Suara Yang Menguatkan: Perempuan Melawan KDRT dan Budaya Diam .....	12
3. Mendobrak Stigma “Amnemat” dan “Perempuan Pendatang” .....	16
4. Bergerak Bersama Perkuat Kohesi Sosial Antara “Orang Bawah” dan “Orang Atas” .....	22
5. Pilah Sampah Organik dan Anorganik .....	28
6. Perempuan Mengoordinir Penanaman Pohon di Desa .....	32
7. Mama Orance: Ketua RT Perempuan Pertama di Desanya .....	36
8. Perempuan Menjadi Pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) .....	40
9. Alokasi Dana Desa untuk Pembentukan Kelompok VSLA di Enam Dusun .....	44
10. Musyawarah Khusus Perempuan (MKP): Jembatan bagi Partisipasi Bermakna Perempuan dalam Musrenbang Desa .....	48
11. Dana Desa untuk Akses Aman Ibu Melahirkan .....	52
12. Perempuan Masuk Tim Ranperdes .....	56
13. “Adik Perempuan Saya Harus Jadi Sarjana” .....	60
14. VSLA: Dompot Terpisah, Keluar Dari Jeratan Utang .....	64

## Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas penyertaanNya sehingga Project WE NEXUS (Perempuan Berdaya untuk Perdamaian Berkelanjutan) yang dilaksanakan oleh Yayasan CIS Timor Indonesia (CIS Timor) dan Save the Children Indonesia dengan dukungan KOICA melalui UN Women yang dimulai Agustus 2024 hingga Juni 2026, saat ini dapat terlaksana dengan baik dan memberi dampak perubahan yang nyata.

Selama kurang lebih dua tahun, terdapat banyak cerita praktik baik dan perubahan yang terjadi pada peserta program dan para pihak, pembelajaran serta tantangan dalam pelaksanaan program. Perubahan yang terjadi pada masyarakat, pemerintah dan para pihak di empat desa di Kabupaten Kupang dan tiga desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Melihat pencapaian dan pembelajaran project sebagai pembelajaran bersama semua kita, maka untuk perubahan yang lebih luas di masa depan, kami persembahkan dokumentasi cerita perubahan aktor keren dan inspiratif dari tujuh desa, baik perubahan pada level individu, komunitas, maupun pemerintah desa. Hasil dokumentasi ini disajikan dalam bentuk buku yang berisikan 14 cerita perubahan sebagai cerminan dampak program. Cerita perubahan ini diharapkan dapat menggambarkan dinamika dan perubahan yang terjadi selama pelaksanaan program dan dapat menginspirasi perubahan individu maupun komunitas di tempat lain.

Untuk pencapaian saat ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua narasumber, Pemerintah Pusat melalui Kemenko PMK, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BNPB, Pemda Kabupaten Kupang dan TTS beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pemerintah tujuh desa dampingan Program We Nexus beserta Pihak Kecamatan beserta seluruh masyarakat dan kelompok, tim program We Nexus — CIS Timor dan Save the Children, UN Women dan KOICA Korea Selatan. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi semua pihak yang belum kami sebutkan atas kontribusinya selama pelaksanaan program We Nexus, hingga hadirnya buku Dokumentasi Cerita Perubahan ini. Tuhan memberkati kita semua selalu.



**Haris Oematan**

Direktur Yayasan CIS Timor Indonesia

## Tentang Program WE NEXUS dan Cerita-Cerita Ini

Di Nusa Tenggara Timur, perempuan menghadapi tantangan berlapis: provinsi termiskin ketiga di Indonesia, rentan terhadap kekeringan dan cuaca ekstrem, serta beberapa wilayah menyimpan potensi konflik akibat ketimpangan akses atas tanah dan air. Di atas semua itu, perempuan hampir tidak pernah duduk di meja pengambilan keputusan, baik saat bencana terjadi, saat konflik diselesaikan, maupun saat pembangunan desa direncanakan.

Yang paling menanggung beban dari semua kondisi ini adalah anak-anak. Ketika komunitas tangguh, bebas dari konflik, siap menghadapi bencana, dan semua anggota masyarakat termasuk perempuan memiliki suara, risiko dampak buruk terhadap anak dapat ditekan secara nyata. Ketangguhan komunitas adalah fondasi di mana anak-anak bisa tumbuh dengan aman.

Program WE NEXUS berangkat dari keyakinan bahwa persoalan kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian tidak bisa diselesaikan secara terpisah; dan perempuan yang turut berdaya adalah kunci dari ketiganya. Pendekatan ini disebut Nexus Kemanusiaan-Pembangunan-Perdamaian (HDP Nexus). Di NTT, pendekatan ini diterapkan Save the Children Indonesia dan Yayasan CIS Timor Indonesia di tujuh desa di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan dukungan KOICA melalui UN Women, dari Agustus 2024 hingga Juni 2026.

Cara kerjanya dimulai dari dalam komunitas desa itu sendiri. Forum Perempuan, Kelompok Kerja (Pokja) Perdamaian, dan kelompok simpan pinjam (Village Savings & Loan Association) dibentuk, serta kelompok karang taruna diberdayakan kembali; semua sebagai ruang belajar dan berorganisasi. Dari sana, perempuan dan kaum muda dibekali berbagai pelatihan dan penguatan kapasitas. Semua bermuara pada tujuan: agar perempuan dapat mempengaruhi kebijakan, perencanaan, atau mekanisme lokal yang membangun ketangguhan. Ketika itu terjadi, manfaatnya tidak berhenti pada kelompok perempuan. Seluruh komunitas ikut terlindungi, termasuk anak-anak.

Selama hampir dua tahun, program ini mencatat keterlibatan 3.734 peserta – 2.538 di antaranya perempuan. Ketujuh desa kini juga punya mekanisme rutin Musyawarah Khusus Perempuan yang diadakan sebelum Musrenbang. Dampaknya tidak berhenti di tingkat desa: program turut mendorong terbitnya Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Musyawarah Khusus Perempuan di Kabupaten Kupang, mendukung proses pengembangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta menghasilkan komitmen Pemkab Timor Tengah Selatan untuk melanjutkan Sekolah Perempuan secara mandiri.

Sebanyak 14 cerita dalam buku ini adalah bukti dari proses tersebut. Kisah-kisah ini adalah milik mereka.

# 1

## Mama Anika, Pendamping Perempuan Penyintas Kekerasan

**B**agi Anika (39), diam bukan lagi pilihan ketika melihat kekerasan terjadi di sekitarnya. Ia tinggal di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Sehari-hari ia adalah ibu rumah tangga yang mengurus anak sambil menjalankan usaha kios. Namun, sejak bergabung dalam Forum Perempuan dan Pokja Perdamaian pada awal tahun 2025, hidupnya mengalami perubahan — dari saksi hingga menjadi pendamping penyintas kekerasan.



*Foto: Mama Anika sedang berdiskusi dalam program WE NEXUS.*

Sebagai seorang presbiter (Majelis Gereja), Anika sudah dikenal dan dihormati di lingkungannya. Posisi ini menjadi modal sosial yang kuat untuk terlibat dalam kerja-kerja pendampingan. Ia mulai memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan rumah tangga, tetapi persoalan kemanusiaan yang membutuhkan keberpihakan.

"Kita harus membantu korban karena kekerasan berdampak tidak baik terhadap mental korban. Melindungi korban karena ada aturan yang mengatur. Saya ingat ini karena sering menyaksikan KDRT yang terjadi di sekitar tempat tinggal," ujarnya.

Melalui Forum Perempuan dan Pokja Perdamaian, ia aktif mengikuti diskusi tentang berbagai kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga ingkar janji kawin. Dari proses ini, ia tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keberanian untuk bertindak. Pelatihan dan diskusi yang diikuti membuatnya semakin peka dan berani bersuara.

Ia menyadari bahwa dalam budaya masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai urusan privat yang tidak boleh dicampuri. Pandangan ini membuat korban tertekan dan pelaku merasa aman.

"Orang enggan ikut campur karena takut dimusuhi pelaku – hubungan sosial terganggu. Takut jadi saksi kalau dibawa ke proses hukum. Korban takut melapor karena akan dipersalahkan," paparnya.

Situasi ini membuat Anika merasa tidak bisa tinggal diam. Ia tergerak terutama ketika melihat anak-anak menjadi korban. "Mereka sama seperti anak saya sendiri," katanya.

Ia bahkan menyaksikan langsung bagaimana seorang pelaku memukul istri dan

anaknya tanpa rasa bersalah. Di lingkungannya, kekerasan sering dianggap hal biasa. "Tetangga su (sudah) bosan karena hanya dong (mereka) saja yang buat ribut. Hari-hari seperti itu," ucapnya menirukan komentar warga. Sikap apatis ini justru membuat kekerasan terus berulang.

Keputusan untuk terlibat dalam pendampingan bukan tanpa risiko. Salah satu pengalaman yang paling membekas adalah saat ia menolong seorang ibu dan anak-anak yang menjadi korban KDRT. Ia membawa mereka ke rumahnya untuk mendapatkan perlindungan. Akibatnya, pelaku marah. Seiring waktu, hubungan itu mulai membaik setelah ia bersama suaminya mendatangi pelaku untuk berdialog dan berdoa bersama. Ia bersyukur karena pelaku akhirnya mau membuka diri.

Pengalaman lain yang tidak kalah berat adalah ketika ia mendampingi seorang anak yang hamil di luar nikah. Anak tersebut menyembunyikan kehamilannya karena takut dimarahi orang tua. Mama Anika mendekatinya, mengajak bicara, memberikan dukungan, dan mendampingi proses penyampaian kepada keluarga. Ia juga meminta orang tua untuk tidak marah berlebihan. Pendekatan ini berhasil. Orang tua menerima kondisi anaknya dan membawanya ke Puskesmas untuk pemeriksaan.

Selain itu, ia juga mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah dilaporkan ke pihak desa. Meskipun sering merasa lega setelah membantu penyintas, proses pendampingan tidak selalu mudah. Ia menghadapi rasa takut, terutama ketika pelaku dalam kondisi mabuk. "Saya takut tiba-tiba pelaku datang dan serang saya," katanya jujur.

Ketakutan lain datang dari tekanan sosial. Ia pernah merasa bersalah karena dianggap mencampuri urusan orang lain. "Yang paling sulit untuk saya, itu bapak tua (pelaku) bilang, 'Jangan ikut campur, mama.'" Namun, setiap kali rasa ragu muncul, ia teringat pada korban, terutama anak-anak yang terluka. Perasaan tidak tega menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk terus bertindak.

Dalam perjalanannya, dukungan keluarga menjadi sangat penting. Suaminya selalu mengingatkan agar ia berhati-hati, tetapi tetap mendukung apa yang ia lakukan. Ia juga menemukan kekuatan dari kelompok perempuan, tempat ia bisa berbagi cerita dan melepaskan beban emosional.

Perubahan mulai terlihat, baik pada korban, pelaku, maupun masyarakat. Korban yang sebelumnya takut kini mulai berani. "Yang saya lihat dari istri sudah tidak takut, awalnya mereka berpisah, sekarang kembali ke rumah, pokoknya ada apa-apa (kegiatan), mereka jalan sama-sama," ungkapnya dengan wajah berseri.

Pelaku pun perlahan berubah. Meski awalnya menjauh dan merasa malu, mereka mulai kembali berinteraksi. "Mulai kejadian itu dong sonde (tidak) bergaul, dong rasa minder deng ketong (dengan kami), tapi syukur sekarang sudah baik kembali dengan kami," tuturnya.

Di tingkat masyarakat, perubahan juga mulai terlihat. Jika sebelumnya korban memilih diam, kini mereka mulai berani melapor ke RT atau pemerintah desa untuk mencari penyelesaian. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Desa. "Sekarang kalau ada masalah KDRT, kekerasan terhadap perempuan, masyarakat sudah mulai lapor di desa, tidak sembunyi-sembunyi lagi seperti dulu," ungkapnya.

Meskipun demikian, mama Anika menyadari bahwa perjuangan ini belum selesai. Ia berharap ada dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pelayanan, agar kerja-kerja pendampingan tidak hanya bergantung pada individu. Ia juga menekankan pentingnya peraturan di tingkat desa untuk mencegah kekerasan. Baginya, menciptakan desa yang bebas dari kekerasan membutuhkan kerja bersama.

Di balik semua tantangan, mama Anika merasakan kebanggaan atas peran yang ia jalani. Baginya, membantu korban bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi tentang mengembalikan harapan dan keutuhan keluarga. Kini, ia tidak lagi hanya menjadi saksi. Ia telah menjadi bagian dari perubahan — perempuan yang memilih untuk berdiri, bersuara, dan berpihak ketika banyak orang memilih diam.

# 2

## Suara yang Menguatkan: Perempuan Melawan KDRT dan Budaya Diam

**B**agi perempuan Timor dengan budaya patriarki yang kuat, menyuarkan isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dianggap tabu. Pandangan ini berakar pada persepsi bahwa urusan rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri orang lain. Bila ada istri yang melaporkan KDRT, ia akan dipersalahkan karena dianggap membuka 'aib rumah tangga' sehingga mencoreng nama baik keluarga. Karena itu, jika korban KDRT adalah sang istri, kasus itu biasanya tidak dilaporkan.



*Foto: Seorang perempuan Timor berpakaian tenun tradisional bermotif hitam-putih duduk di tangga.*

Alasan lain yaitu korban takut pada ancaman pelaku, adanya ketergantungan ekonomi pada pelaku, dan minimnya dukungan dari masyarakat sekitar korban. Kondisi ini membuat KDRT kerap dinormalisasi sebagai bagian dari 'ujian hidup rumah tangga'. Padahal, KDRT adalah kejahatan serius yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Korban yang menyuarkan KDRT sejatinya tidak membuka aib rumah tangga karena KDRT merupakan kejahatan. Korban yang berani menyuarkan KDRT patut mendapat apresiasi karena menjadi contoh baik bagi perempuan lain yang menjadi korban.

Mama Lia\* dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menjadi contoh penting. Ia adalah korban KDRT yang akhirnya berani bersuara dan menjadikan pengalamannya sebagai pembelajaran bagi perempuan lain.

Keberanian itu tidak datang begitu saja. Mama Lia mulai menemukan kekuatan setelah bergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perdamaian dan Forum Perempuan di Program WE NEXUS. Melalui pelatihan di Kota Kupang, ia mendapatkan pengetahuan tentang kepemimpinan perempuan, partisipasi di forum desa, serta pemahaman tentang KDRT. Di berbagai forum desa, mama Lia mulai aktif menyuarkan aspirasi perempuan.

Ia dan kelompok mama-mama kini semakin berani berbicara, baik dalam kelompok kecil maupun di depan publik. Dalam pertemuan, mereka saling berbagi cerita tentang persoalan rumah tangga yang sebelumnya dianggap tabu.

Keaktifan perempuan di desa diamini oleh seorang kepala dusun. "Mama-mama juga nona-nona sekarang aktif dalam kelompok perempuan di desa. Saat ikut Musrenbang dusun dan desa, mereka berani bicara – tidak seperti dulu, mereka takut dan malu," ungkapnya.

Mama Wasti juga menyampaikan hal yang mirip. "Sekarang mama-mama mulai aktif omong (bicara) tentang masalah KDRT di desa, dulu jarang orang baomong," jelasnya.

Meski demikian, proses ini tidak selalu mudah. Setiap kali membicarakan KDRT, ia sering diliputi emosi. "Saya tidak ingin menyampaikan pengalaman orang lain karena takut ada yang tersinggung. Saya berbagi pengalaman saya sendiri," katanya sambil menyeka air mata di pipinya. "Saya punya cerita semoga jadi contoh untuk perempuan lain agar berani bercerita, karena pendam sendiri tidak baik, sakit, bahkan ada yang bunuh diri. Saya harap perempuan bisa belajar dari saya punya masalah," ujar mama Lia.

Kisah hidup mama Lia sendiri penuh dinamika. Ia mengenal suaminya sejak masa SMA. Setelah berpacaran sekian tahun, mereka menikah. Dalam tahun-tahun awal pernikahan, mereka dikaruniai anak-anak perempuan.

Dalam budaya Timor, kehadiran anak laki-laki sering dianggap penting sebagai penerus garis keturunan. "Keluarga dan suami berharap saya melahirkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan," tuturnya.

Setelah beberapa tahun bekerja dan menabung, Mama Lia berinisiatif membeli kendaraan dari tabungannya untuk membantu suami mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, yang terjadi tidak sesuai harapan. Suaminya berubah — ia berselingkuh dan melakukan kekerasan. "Saya pikir, saya cantik, punya pekerjaan, penghasilan sendiri, tapi suami masih selingkuh," tuturnya.

Meski menghadapi kekerasan, Mama Lia tidak memilih perceraian. Ia memegang teguh prinsip imannya bahwa pernikahan hanya dipisahkan oleh maut. Ia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga rumah tangganya. Dalam situasi sulit itu, dukungan datang dari keluarga besar, termasuk mertuanya. "Saya bertahan bukan dalam diam, tetapi berdoa. Akhirnya saya hamil dan melahirkan anak laki-laki," ungkapnya.

Kelahiran anak laki-laki menjadi titik balik dalam rumah tangganya. Sikap suaminya berubah, dan kondisi keluarga mulai membaik. Meski demikian, trauma masih membekas dan ia tetap waspada agar kekerasan tidak terulang. Kini, selain

menjalankan perannya di dunia pendidikan, Mama Lia terus aktif sebagai fasilitator dan penggerak.

Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa perubahan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan keberanian, dukungan, dan kesadaran. Kini, fokus utamanya adalah memastikan masa depan anak-anaknya.

*\*) Nama disamarkan untuk melindungi narasumber.*

# 3

## Mendobrak Stigma “Amnemat” dan “Perempuan Pendatang”

**N**usa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai provinsi yang sangat beragam, baik suku, bahasa, etnis, adat, kebiasaan, maupun agama. Termasuk di desa ini, di mana mayoritas suku yang mendiami desa adalah suku Timor-Atoni Meto dan umumnya beragama Protestan. Penduduk dari suku lain yang datang dan mendiami desa tersebut disebut "amnemat". Arti harfiahnya pendatang, tapi makna mendalamnya mengingatkan bahwa pendatang harus bisa menempatkan diri karena ini adalah tanah penduduk asli. Makna kata amnemat memberi pesan kuat pembedaan di desa antara warga asli dan pendatang.



*Foto: Mama Monika berbicara serius dalam sebuah sesi diskusi pada program WE NEXUS.*

Dalam diskusi kelompok terfokus Maret 2026, mama Monika dan mama Samalina sangat aktif dalam menyampaikan pendapat. Beberapa kali mereka menegaskan "Saya sebagai perempuan pendatang di sini." Sebutan ini menegaskan status mereka sebagai amnemat. Tetapi di sisi lain ada kebanggaan, karena sebagai amnemat mereka aktif dan menjadi penggerak perubahan kelompok perempuan di desa.

Mama Monika, perempuan suku Tetun, pindah ke desa ini setelah menikah, mengikuti suaminya yang adalah penduduk asli. Mama Samalina perempuan suku Alor, suaminya juga penduduk asli. Lain cerita, bapak mertuanya suku Alor, mama mertua orang asli desa ini, maka suaminya menjadi warga asli karena sistem kekerabatan desa ini ditarik dari garis keturunan ibu atau matrilineal. Perempuan mendapatkan hak waris, namun hak suara dalam pengambilan keputusan didominasi oleh laki-laki.

Mama Monika dan mama Samalina menyampaikan pandangan yang sama bahwa tantangan perempuan amnemat lebih berat dibandingkan dengan laki-laki amnemat. Perempuan dilarang keluar rumah, laki-laki tidak. Suara laki-laki masih berpeluang didengar dibandingkan perempuan. Perempuan lebih rentan menjadi bahan pergunjungan dibanding laki-laki.

Masyarakat membagi wilayah kegiatan perempuan di dalam rumah, laki-laki di luar rumah. Lebih banyak perempuan mulai berkegiatan di luar rumah semenjak masuknya program WE NEXUS tahun 2024. Pembentukan Forum Perempuan, kelompok VSLA, dan Pokja Perdamaian yang mayoritas anggotanya perempuan menjadi pendorong yang baik.

Berkegiatan di luar rumah ada tantangannya seperti penjelasan mama Monika. "Beta (saya) bergabung dengan forum perempuan. Awalnya suami sonde (tidak) setuju, apalagi beta dianggap perempuan pendatang di ini desa. Suami bilang, 'beta kawin dengan lu (kamu), bawa datang sini untuk urusan dalam rumah bukan pi (pergi) urus orang lain.'" Walaupun dimarahi dan sering beradu mulut, mama Monika tetap mengikuti kegiatan. "Suami bilang, 'Lu pi, ma (tetapi) ada apa-apa, lu urus sendiri.'"



*Foto: Mama Samalina berbicara serius dalam sebuah sesi wawancara pada program WE NEXUS.*

Tantangan lain datang dari mama mertua. Mama Monika pernah dimarahi menggunakan bahasa Timor-Dawan, jika diartikan seperti ini, "Saya punya anak laki-laki kawin dengan kamu, bawa kamu ke sini supaya mengurus rumah dengan anak, bukan sibuk di luar rumah." Mertuanya berbicara begitu karena dia merasa saat kegiatan di luar, anak laki-laknya harus bekerja mengurus rumah, sehingga istri akan menjadi besar kepala dan mengatur suami, padahal ini dianggap tabu. Tantangan sebagai istri menjadi lebih berat, karena saat menikah ia kurang diterima, suaminya dianggap salah pilih istri karena berasal dari suku lain.

Berbeda dengan mama Samalina, suami dan mama mertua mendukung ia berkegiatan di luar rumah. Menurutnya tantangan justru datang dari keluarga besar dan tetangga sekitar rumah. Sering kali ia mendengar pernyataan, "Ini perempuan, tapi kerja hanya bajalan (berjalan) terus di luar rumah."

Tantangan yang dihadapi menjadi pemacu bagi mereka dalam menggerakkan kelompok perempuan di desa melalui program WE NEXUS. Penguatan kapasitas yang diperoleh melalui pelatihan dan diskusi telah meningkatkan kesadaran mereka bahwa perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Mama Monika mengingat materi dalam pelatihan Pokja Perdamaian tentang membangun komunikasi yang baik. Ia baru menyadari bahwa ada dialek yang dianggap biasa di daerah asalnya, namun dianggap kasar di tempat tinggalnya. Ini menjadi salah satu pemicu pertengkaran. Ia belajar untuk mengubah cara komunikasi dengan suami dan keluarga. Saat selesai pelatihan ia selalu berbagi materi yang diperoleh. Ia mencari waktu yang tepat dan penggunaan dialek yang sesuai. Ia juga meminta bantuan bapa mertua yang adalah seorang Ketua RT, untuk membantu menjelaskan ke suami dan mertua tentang kegiatannya. Cara ini cukup berhasil.

Suatu waktu saat kembali ke rumah dari pelatihan bersama Pokja Perdamaian, mama Monika bilang ke suaminya, "Bapa, beta sekarang dapat tugas untuk kasih informasi ke masyarakat supaya sonde melakukan kekerasan. Kitong (kita) harus jadi contoh. Jangan sampai beta kasih informasi ke orang lain, tapi ada kekerasan di kitong pung rumah tangga, na buat malu."

Perubahan dalam keluarga mulai terasa. Suami mulai jarang marah bila ia berkegiatan di luar rumah, bersedia menjaga anak dan mengurus rumah. Mama mertua tidak marah lagi, bahkan telah bergabung dengan kelompok tenun. Adik ipar perempuannya, Yani, juga bergabung dengan kelompok perempuan di desa. Kata "amnemat" sudah jarang didengar.

Saat wawancara, Yani membenarkan perubahan dari kakak laki-laki dan mamanya. "Sekarang kakak dan mama sonde marah-marah seperti dulu. Dong (mereka) sudah tahu bahwa kegiatan perempuan di luar baik dan ada manfaat."

Mama Samalina mengemukakan penguatan kapasitas melalui program WE NEXUS telah meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan mengubah cara pandang.

Saat ini kata-kata amnemat sudah jarang didengar dalam pertemuan keluarga dan masyarakat. Artinya cara pandang tentang perempuan amnemat mulai berubah. Partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa sudah diakui. Saat Musrenbang Desa, Forum Perempuan diundang dan suara mereka didengar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Urusan Perencanaan Desa.

"Sekarang perempuan sangat aktif dalam rapat-rapat desa. Dulu dalam Musrenbangdes, perempuan hadir tapi tidak berbicara. Sekarang mereka aktif menyampaikan pendapat. Tahun lalu (2025), mama Samalina dipilih untuk mewakili kelompok perempuan dalam Tim Pembentukan Ranperdes (Rencana Peraturan Desa). Tahun ini (2026), mama Monika dipilih mewakili kelompok perempuan dalam Musrenbang Kecamatan. Mereka terpilih karena sangat aktif di desa dan berani bicara di forum."



## 4 Bergerak Bersama Perkuat Kohesi Sosial antara “Orang Bawah” dan “Orang Atas”

**R**eferendum Kemerdekaan Timor Timur tahun 1999 membawa berbagai dampak, salah satunya terjadi pengungsian yang besar dari Timor Leste (saat itu Timor Timur) ke Indonesia, terutama ke wilayah Timor Barat yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Sebuah desa di Kabupaten Kupang menjadi salah satu tempat tujuan pengungsi. Konflik antara pengungsi dan warga lokal sering terjadi di sini.

Konflik terjadi dalam waktu yang panjang. Walaupun berkurang sejak tahun 2021, potensi konflik tetap ada. Dalam pemetaan ancaman bencana yang dilakukan Pokja Perdamaian desa ini pada tahun 2024, konflik seperti tawuran antara warga baru dan warga lama masuk dalam kategori ancaman tertinggi, karena bisa terjadi kapan saja. Dalam jangka waktu yang panjang, adanya prasangka, pelabelan negatif terhadap pengungsi sebagai 'sumber masalah' dan ketidakpercayaan, menyebabkan hubungan antara warga baru dan warga lama sering tidak harmonis. Sampai saat ini, masyarakat desa membedakan sebutan warga berdasarkan tempat tinggal, yaitu 'orang bawah' (warga baru) dan 'orang atas' (warga lama). Penyebutan ini mengikuti wilayah tempat tinggal, tetapi juga menunjukkan adanya keterpisahan.



*Foto: Dua peserta perempuan program WE NEXUS sedang berdiskusi bersama di sebuah kegiatan.*

Staf Yayasan CIS Timor Indonesia, Buce Ga, menjelaskan bahwa hubungan yang tidak harmonis antara orang atas dan orang bawah menjadi dasar pertimbangan yang sangat kuat dalam pembentukan berbagai kelompok di desa. Program WE NEXUS mendorong agar kelompok-kelompok yang dibentuk, anggotanya harus ada percampuran antara orang atas dan orang bawah. Isu tentang kohesi sosial menjadi materi penting dalam pelatihan Pokja Perdamaian. Kegiatan bersama antara orang atas dan orang bawah memperkuat hubungan sehingga lebih harmonis.



*Foto: Niko sedang duduk dan menyimak serius sesi diskusi dalam program WE NEXUS.*

Niko (29 tahun), petani, orang bawah. Novi (32 tahun), petani, orang atas. Keduanya merupakan penggerak Pokja Perdamaian dan Forum Perempuan di desa mereka. Mereka bergabung dalam Pokja Perdamaian sejak dibentuk pada awal 2024 lalu. Novi, selain menjadi anggota Pokja Perdamaian, juga bergabung dengan kelompok simpan pinjam desa (VSLA) dan Forum Perempuan. Niko adalah pengurus Karang Taruna, tetapi sudah mengundurkan diri sejak bulan Januari 2026 karena terpilih sebagai ketua Koperasi Merah Putih Desa.

Saat diskusi berlangsung, Niko mengingat kembali peristiwa 25 tahun yang lalu. Ia berusia 3 tahun saat dibawa mengungsi oleh kedua orang tuanya bersama empat saudara lain. Bertumbuh dalam tempat pengungsian, menyaksikan kekerasan dan konflik yang sering terjadi sangat berpengaruh terhadap pandangan dan perilakunya terhadap warga lokal.

"Dulu saya ada dalam hampir semua konflik, sering saya yang pimpin semua perkelahian antar anak muda atas dan bawah. Kalau ada pesta di desa dan saya datang, tuan pesta kasih pengumuman untuk pesta bubar karena takut ada perkelahian di pesta," ungkap Niko.

Novi menambahkan, "Sejak awal pengungsi datang, hubungan dengan warga lokal sonde (tidak) harmonis. Sering berkelahi, sonde ada kebersamaan, saling curiga," ungkapnya. Pemicu masalah orang atas dan orang bawah antara lain karena air bersih dan perebutan tanah.

Menurut Niko, ia mulai berubah sejak dicalonkan menjadi ketua Karang Taruna pada 2019 lalu. "Visi saya saat itu menyatukan pemuda bagian atas dan bagian bawah. Saya menyadari bahwa stigma buruk "pengacau" di lingkungan tempat tinggal

harus dihilangkan karena usia tambah tua," jelasnya. Upaya untuk menyatukan kelompok orang muda atas dan bawah melalui Karang Taruna tidak mudah. Masih ada saling curiga. Kegiatan-kegiatan bersama Karang Taruna masih sangat kurang. Keaktifan anggota Karang Taruna masih sangat rendah, apalagi kurang didukung oleh dana operasional.

Melalui program WE NEXUS, Karang Taruna mulai aktif karena anggotanya juga tergabung dalam Pokja Perdamaian. Banyak hal dipelajari seperti pencegahan bencana, komunikasi, menghargai perbedaan, hingga pencegahan KDRT. Selain pelatihan, ada juga diskusi internal Karang Taruna untuk membahas apa yang mereka peroleh di pelatihan dan rencana kegiatan bersama Pokja Perdamaian. Salah satu kegiatan bersama Pokja Perdamaian adalah pembersihan mata air di desa.

"Ini merupakan kegiatan pembersihan mata air yang pertama kali di desa," jelas Novi.

Materi kebencanaan yang diperoleh saat pelatihan Pokja Perdamaian membuat mereka sadar tentang pentingnya menjaga mata air, apalagi sebagian wilayah tempat tinggal kesulitan air bersih. Pokja Perdamaian juga melakukan sosialisasi di gereja Katolik dan gereja Protestan tentang stop kekerasan terhadap perempuan. Sosialisasi ini penting karena kekerasan terhadap perempuan terjadi di desa. Warga bawah hampir semua beragama Katolik, sementara warga atas hampir semua beragama Protestan. Menarik, karena melalui sosialisasi, warga yang beragama Katolik dan Protestan saling berkunjung lintas gereja.

Novi bercerita, "Di kelompok VSLA, kitong (kita) tiap bulan ada pertemuan. Awal-awal kitong sonde terlalu akrab. Hanya baomong (diskusi) tentang simpan pinjam. Lama-lama kitong bacarita tentang kitong pung kehidupan setiap hari. Kitong tambah akrab. Sekarang kalau ada kedukaan di orang bawah, kitong di kelompok pi (pergi) melayat dan sebaliknya. Kitong ju (juga) bakumpul uang duka secara sukarela untuk sumbangan buat keluarga duka."

Novi melanjutkan, "Dulu beta (saya) sonde pernah pi orang bawah. Sekarang biar sonde ada kegiatan VSLA ju, beta dan kawan-kawan lain dari atas pi maen di bawah."

Niko menyambung bahwa warga bawah diterima oleh warga atas. "Dulu kalau mau makan kelapa muda harus beli, sekarang tidak lagi. Kalau lewat rumah warga atas, tuan rumah selalu tanya, 'Anak mau pi mana, singgah ko makan kelapa muda,'" ungkap Niko.

Kelompok perempuan dalam diskusi menyampaikan pendapat yang sama, bahwa kegiatan bersama di kelompok yang dibentuk melalui program WE NEXUS telah memperkuat rasa saling percaya, serta mengikis kecurigaan di antara sebagian orang atas dan orang bawah. Mereka berharap ke depan, hasil positif ini harus terus disebarkan ke lebih banyak orang di desa.



# 5

## Pilah Sampah Organik dan Anorganik

**S**ekolah Perempuan (Sekoper) merupakan salah satu forum untuk perempuan belajar bersama di desa. Sekoper bertujuan untuk memperkuat kapasitas perempuan di desa agar memahami permasalahan mereka, permasalahan masyarakat, serta berperan aktif untuk mendorong perubahan di desa. Salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini adalah contohnya. Kegiatan Sekoper dimulai di sini pada November 2025 melalui Program WE NEXUS.



*Foto: Sejumlah perempuan peserta program WE NEXUS sedang terlibat dalam sesi diskusi kelompok.*

Sebelum memulai Sekoper, Forum Perempuan dan Pokja Perdamaian berembuk untuk memilih perwakilan yang akan mengikuti pelatihan fasilitator selama dua hari di Kupang. Mereka yang terpilih yaitu Yusmina, Yesarela, Richie, dan Ima. Keempat orang yang terpilih telah berkomitmen untuk membentuk Sekoper di desa.

Pelaksanaan Sekoper berjalan empat bulan. Setiap pekan dilaksanakan dua kali pertemuan, antara jam 14.00–16.00. Pilihan jam disesuaikan dengan waktu luang mama-mama di desa. Pertemuan dilakukan di kantor desa. Ini memperlihatkan dukungan penuh pemerintah desa terhadap Sekoper, sebagaimana disampaikan Kepala Desa setempat.

"Kami sangat mendukung terbentuknya kelompok-kelompok perempuan di desa melalui program WE NEXUS. Pemerintah desa menyiapkan kantor desa untuk pelaksanaan Sekoper. Kami dukung karena kelompok yang ada bermanfaat. Sekarang perempuan di desa lebih aktif dan berani bicara di depan banyak orang, tidak malu-malu seperti dulu," ungkap Kepala Desa.

Mama Yusmina menyampaikan materi yang dia peroleh selama Sekoper antara lain seperti KDRT dan cara penanganannya, gender dan kesetaraan peran, pengelolaan keuangan rumah tangga, kesehatan dan sanitasi, serta pengelolaan sampah organik dan anorganik. Salah satu materi yang langsung dipraktikkan oleh anggota Sekoper, yaitu pengelolaan sampah organik dan anorganik.

Nona, salah satu perempuan muda Sekoper, merespons materi ini. "Pilah sampah penting, baru pertama kali kami diajarkan. Selama ini, hampir semua masyarakat, termasuk kami yang ikut Sekoper, sering buang sampah sembarangan dan tidak pernah pilah sampah," ungkapnya.

Perubahan pertama yang langsung dilakukan anggota Sekoper yaitu pengadaan

tempat sampah, buang sampah pada tempatnya, dan memilah sampah organik dan anorganik. "Kami langsung praktikkan karena tiap hari kami ada sampah di rumah masing-masing. Untuk pilah, tidak perlu bantuan orang lain, kami bisa lakukan sendiri. Kami baru sadar kalau apa yang kami lakukan selama ini salah dan berbahaya bagi kesehatan," jelas mama Yusmina.

Fitriana sangat semangat menceritakan pengalamannya. "Saya sampaikan materi tentang pilah sampah ke bapa dan mama. Saya kasih tahu hal-hal baik untuk menjaga kesehatan, kalau kita buang sampah di tempatnya dan pilah sampah. Saya bersyukur karena bapa dan mama menerima apa yang saya sampaikan. Bapa mencari daun lontar dan mama menganyam dua tempat sampah untuk rumah mereka. Sampai saat ini, mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan dan selalu memilah sampah basah dan kering. Sampah basah, seperti makanan sisa, seperti sayuran, biasa dipakai untuk makanan ternak peliharaan, seperti kucing, anjing, dan babi. Kaleng dan botol bekas kini juga dikumpulkan untuk dijual," ungkap Fitriana.

Mama Lebrina, mama Janri, mama Sani, serta anggota Sekoper lain sudah mempunyai dua tempat sampah di rumah. Sebagian anggota Sekoper membuat tempat sampah dengan anyaman daun lontar, sebagian lain membeli dua tempat sampah berbahan plastik. Ada juga yang menggunakan ember untuk sampah basah dan dos bekas yang agak besar untuk sampah kering. Anak-anak dan keluarga inti anggota Sekoper diajarkan untuk pilah sampah. "Kita harus jadi contoh, mulai dari kita punya rumah, supaya kalau kita omong, orang lain ikut," jelas mama Lebrina.

"Jadi itu (pilah sampah) ada pandangan baik dari tetangga-tetangga sekitar. Pada saat mereka berkunjung di rumah dan tidak sengaja melihat kita memisahkan sampah, itu mereka jadi bilang, ini bagus, jadi kita harus buat di rumah juga," ungkap mama Yusmina menambahkan.

Informasi tentang pilah sampah disampaikan dari tetangga sekitar hingga keluarga besar. Ada yang sudah mengikuti, ada yang belum. "Kita perlu waktu untuk dorong orang berubah," kata mama Yusmina.

Mama Yusmina dan anggota Sekoper lain berencana membangun dialog dengan pemerintah desa agar pemilahan sampah diatur melalui peraturan pemerintah desa. Mereka juga berencana untuk melakukan sosialisasi melalui gereja. Mereka yakin bahwa pemerintah desa akan mendukung, apalagi selama ini Sekoper mendapat dukungan dari pemerintah desa, bahkan salah satu fasilitator Sekoper merupakan aparat desa setempat.



# 6

## Perempuan Mengoordinir Penanaman Pohon di Desa

**S**alah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dikenal memiliki pantai yang sangat indah dan menjadi destinasi wisata favorit warga TTS dan sekitarnya. Namun, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh warganya yaitu ancaman longsor di wilayah rawan. Banjir luapan muara sungai kerap terjadi ketika hujan deras turun. Abrasi pantai menggerus pesisir yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekitar. Perubahan iklim yang terjadi berdampak pada semakin sulitnya prediksi tentang waktu turun hujan, sehingga menyulitkan prediksi kapan sungai berpotensi meluap.



*Foto: Sesi pelatihan kelompok perempuan di program WE NEXUS.*

Dalam jangka waktu yang cukup panjang, isu perubahan iklim seperti banjir dan abrasi belum menjadi perhatian serius bagi warga dan pemerintah desa. Abrasi mulai terlihat di kawasan pantai, terutama di belakang area wisata kuliner. Ancaman ini nyata, tetapi belum banyak upaya yang dilakukan. Bahkan, perempuan di desa hampir tidak pernah terlibat dalam kegiatan menjaga lingkungan seperti mencegah bencana seperti longsor dan banjir.

Kehadiran program WE NEXUS menjadi momentum penting dalam mendorong perubahan ini dengan mendorong pembentukan Forum Perempuan, Kelompok Kerja (Pokja) Perdamaian, dan Sekolah Perempuan (Sekoper). Kelompok-kelompok ini mendapatkan penguatan kapasitas dan pemahaman tentang sejumlah isu, termasuk perubahan iklim. Metode penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, hingga diskusi reguler di kelompok.

Ruang belajar melalui kelompok memunculkan ide sederhana namun bermakna, seperti menanam pohon untuk pencegahan banjir dan abrasi pantai. Kesadaran muncul bahwa jika tidak melakukan sesuatu, lingkungan akan semakin rusak dan dampaknya dirasakan banyak orang.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu mendatangi kepala desa untuk menyampaikan ide tersebut. Dukungan pemerintah desa menjadi titik penting dalam perubahan ini. Kepala desa menyambut baik gagasan tersebut dan memberikan saran serta strategi untuk menanam pohon mahoni. Pilihan ini diambil karena tersedia banyak anakan pohon mahoni yang bisa disumbangkan secara gratis. Pohon mahoni tidak disukai ternak seperti kambing sehingga peluang tanaman ini untuk bertahan hidup lebih besar.

Hari penanaman pohon menjadi momen penting. Namun, momen penting lain yaitu untuk pertama kalinya di desa ini, perempuan mengambil peran dalam mengoordinir aksi tersebut. Kehadiran kelompok perempuan menjadi contoh baik sekaligus mengirim pesan kuat, bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas

laki-laki atau pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama semua warga termasuk perempuan. Aksi ini turut menggerakkan beberapa laki-laki untuk ikut serta menanam pohon. Bahkan pemerintah desa juga menunjukkan dukungan dengan menyediakan fasilitas sederhana seperti makanan dan minuman.

Salah satu tantangan usai penanaman pohon yaitu merawat pohon agar dapat tumbuh. Hal ini disadari oleh anggota kelompok. Mereka membagi tanggung jawab di antara anggota untuk secara bergiliran merawat pohon, seperti menyiram tanaman hingga mencabut rumput di sekitarnya. Mereka berharap pohon dapat tumbuh dengan baik sehingga bisa mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Perubahan ini berhadapan dengan tantangan seperti masih rendahnya partisipasi masyarakat. Tidak mudah mengubah kebiasaan dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama ketika manfaatnya belum langsung terlihat. Namun aspek perubahan yang paling terasa yaitu perempuan yang sebelumnya tidak terlibat dalam isu lingkungan, kini menjadi penggerak utama. Perubahan penting lain yaitu komitmen pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa bagi pembangunan bronjong atau keranjang batu di kawasan pesisir, dengan tujuan menahan abrasi lebih lanjut.

Pemeliharaan pohon mahoni terus dilakukan sampai saat ini. Menurut kelompok, "Kami inilah yang harus bertanggung jawab terhadap pohon yang telah ditanam." Mereka terus mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam merawat dan menanam pohon lainnya. Meski tidak mudah, hal ini harus dimulai. Harapannya,



Foto: Sesi diskusi kelompok perempuan di program WE NEXUS.

lebih banyak pihak mau terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan.  
"Lebih baik melakukan pencegahan daripada harus menanggung akibatnya nanti."

Komitmen pemerintah desa untuk mengalokasikan dana untuk pembuatan bronjong harus dikawal agar dapat terealisasi. Pengawasan ini penting karena efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan alokasi dana desa dapat berimplikasi terhadap keberlanjutan komitmen terhadap program desa terkait lingkungan.

# 7

## Mama Orance: Ketua RT Perempuan Pertama di Desanya

**U**ntuk pertama kalinya, seorang perempuan bisa menjadi ketua RT di sebuah desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Namanya Mama Orance. "Saya dulu orang tidak dipandang, saya ini orang yang terbelakang, Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi sekarang saya bangga karena aparat desa sepakat taruh saya jadi RT. Suami su (sudah) undur diri dari RT. Bapa Desa (Kepala Desa), Ketua BPD, dan Ketua Tim Penggerak PKK yang usul saya pung nama. Saya senang dan bangga karena sekarang saya sudah jadi ketua RT," kata Orance.



*Foto: Mama Orance dalam sebuah diskusi di program WE NEXUS.*

Orance (49) adalah ibu dari tiga orang anak. Seharian ia biasa disapa Mama Ora. Ia bekerja sebagai penenun sekaligus petani. Sama dengan perempuan desa umumnya, ia jarang berkegiatan di luar rumah, kecuali mengikuti ibadah di sekitar rumah.

Pada awal tahun 2024, dua tahun sebelum menjadi Ketua RT, ia diajak oleh Theresia, Ketua Forum Perempuan, untuk bergabung dalam forum tersebut. Ia tertarik dan bergabung karena perempuan anggotanya akan diskusi dan belajar bersama supaya bisa aktif di desa. Saat ia menyampaikan keinginan untuk berkelompok, suaminya mengizinkan. Saat itu suaminya adalah Ketua RT yang punya komitmen untuk mendukung kelompok yang terbentuk di desa. Mama Ora juga bergabung ke dalam kelompok simpan pinjam desa berbasis VSLA dan Sekoper (Sekolah Perempuan).

Saat diskusi bersama, mama-mama di desa menjelaskan banyak hal yang mereka pelajari dalam kelompok. "Kini kita jadi lebih paham tentang hak perempuan, kesetaraan, kebersihan lingkungan, tabung uang dan atur uang, sampai bicara di depan umum," Mama Ora menjelaskan. Mama Juridna menyambung, "Sekarang banyak perempuan lebih berani bicara di depan banyak orang, padahal dulu masih malu-malu."

Mama Ora melanjutkan, "Saya ini omong Bahasa Indonesia jatuh bangun, tapi waktu Yayasan CIS Timor Indonesia masuk, kami jadi mulai belajar sedikit-sedikit. Akhirnya saya mulai tahu omong soal pemerintahan dan kerohanian."

Suami Mama Ora menjabat sebagai Ketua RT sejak 2023. Pada awal Januari 2026, ia mengundurkan diri dengan alasan sudah tua. Pemerintah desa pun berembuk dan akhirnya menunjuk Mama Ora untuk menggantikan peran suaminya. "Terus terang saya kaget," kenang Mama Ora mengingat penunjukan itu.

Menurut Ketua Penggerak PKK Desa, Juridna, "Harus ada perempuan yang menjadi ketua RT karena kepala dusun, ketua RW, ketua RT, semuanya laki-laki. Mama Ora pantas menjadi Ketua RT. Selama ini beliau aktif dalam kegiatan kelompok WE



*Foto: Kelompok VSLA di salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan.*

NEXUS di desa. Ia bisa mengajak masyarakat."

Kepala Desa mendukung apa yang disampaikan oleh Juridna. Menurut beliau, "Ada aturan tentang kuota 30 persen bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Kami melihat Mama Ora aktif di lingkungan."

Ada warga yang setuju, ada pula yang tidak setuju dengan penunjukan Mama Ora sebagai Ketua RT. Setelah pemilihan, Mama Ora melakukan pendekatan ke warga yang tidak setuju hingga akhirnya mereka mendukungnya, walaupun belum semua.

Menurut Mama Ora, ia menerima jabatan ketua RT karena beberapa alasan. "Sekarang perempuan setara dengan laki-laki. Saya juga mau mengubah lingkungan jadi lebih aman karena sering terjadi ribut-ribut. Saya mau ubah pendekatan dengan masyarakat, tidak kasar seperti suami saya dulu," jelas mama Ora.

Saat awal menjabat, Mama Ora mengumpulkan semua warga. "Saya sekarang jadi RT, tapi saya tidak lebih dari mama-mama dan bapa-bapa, saya di bawah. Saya jadi ketua, tapi saya di bawah," ungkapnya kala itu. Ungkapan itu merupakan wujud kerendahan hati Mama Ora sebagai pelayan masyarakat.

Tantangan pertama sebagai ketua RT datang dari kerabatnya. Saat itu ia meledek Mama Ora yang tidak tahu berbahasa Indonesia dan meragukan kemampuan bicara di depan umum. Bahkan saat diundang untuk mengikuti gotong royong, mereka tidak bersedia ikut karena akan merasa malu bila Mama Ora tidak bisa memimpin. Mama Ora pun bilang, "Baik, kita lihat kalau dalam waktu satu tahun saya tidak bisa, saya mundur," tegasnya. Memasuki bulan kedua Mama Ora menjabat, kerabatnya

akhirnya memberi pengakuan, bahwa ia juga bisa memimpin.

Berbagai terobosan dilakukan Mama Ora. Kalau ada keributan, Mama Ora tidak menegur di depan umum. Ia akan pergi ke rumah untuk menegur dan menasihati. Dulu mama-mama jarang ikut gotong royong, sekarang ikut karena mereka diundang langsung dari rumah ke rumah. Kini lingkungan juga jadi lebih bersih. Kalau ada rumah yang banyak rumput, ia akan melakukan pendekatan supaya rumput dibersihkan.

Dalam melaksanakan rapat RT, Mama Ora mengadakan rapat dalam waktu yang berbeda antara perempuan dan laki-laki — sesuai pemahaman yang ia dapat dari kegiatan program WE NEXUS. "Kalau perempuan akan lebih berani bersuara kalau ada kelompok sendiri," jelasnya. Perubahan memang perlu dimulai bertahap.

Saat ini di RT-nya telah dibentuk kelompok tenun ikat. Ada pula kelompok dapur hijau yang menanam sayur. Kelompok ini mendapat dukungan dana dari pemerintah desa. Menurut Mama Ora, ia didukung oleh pemerintah desa.

"Orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di lingkungan RT selalu hadir bila diundang rapat. Keluarga juga sangat mendukung. Dulu suami sering mabuk, tetapi sekarang tidak lagi. Anak laki-laki saya dulu suka duduk-duduk di pinggir jalan dan buat onar, tetapi sekarang tidak lagi. Mereka bilang tidak mau mempermalukan saya," ungkap Mama Ora.

Kepala dusun setempat, Stevanus, mengamati perubahan kepemimpinan tersebut. "Masyarakat sekarang lebih menghargai perempuan, sudah lebih banyak yang menerima perempuan sebagai pemimpin, salah satu contohnya adalah Mama Ora. Perempuan yang aktif di kelompok-kelompok ini sudah diterima, tidak seperti dulu. Ini kemajuan yang baik semenjak program WE NEXUS masuk," ungkapnya.

# 8

## Perempuan Menjadi Pengurus Koperasi Merah Putih (KMP)

**M**endorong perempuan masuk dalam struktur organisasi desa bukan hal yang mudah, terutama dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Di salah satu desa di Kabupaten Kupang, kondisi ini juga sangat terasa. Selama ini, struktur organisasi desa didominasi oleh laki-laki, sementara perempuan cenderung berada di posisi subordinat.

Budaya patriarki sendiri merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, mengistimewakan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam kepemimpinan. Dalam sistem ini, perempuan sering dibatasi perannya, dibebani tugas perawatan dan mengurus rumah tangga saja, hingga dianggap tidak layak berada di ruang publik. Dalam waktu yang panjang, konstruksi sosial ini membentuk ketimpangan gender yang mengakar.



*Foto: Peserta program WE NEXUS mengikuti sesi diskusi dalam sebuah pertemuan kelompok.*

Namun demikian, upaya untuk mengubah kondisi ini mulai dilakukan. Mendorong partisipasi perempuan dalam organisasi desa menjadi langkah strategis. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah pembentukan kelompok perempuan di desa seperti Forum Perempuan, Kelompok Simpan Pinjam Desa (VSLA), hingga Pokja Perdamaian melalui Program WE NEXUS. Tujuan pembentukan kelompok-kelompok ini adalah untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak partisipasi mereka di ruang publik. Berbagai pelatihan dan diskusi pun dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan serta aparat desa agar mendukung kepemimpinan perempuan di desa.

Keaktifan perempuan dalam kelompok yang dibentuk melalui Program WE NEXUS menjadi pintu masuk bagi lahirnya kepemimpinan perempuan. Salah satu capaian penting adalah terpilihnya sembilan perempuan untuk menjadi pengurus Koperasi Merah Putih. Mereka menduduki posisi penting, di antaranya ketua dan sekretaris.

Kemajuan ini patut diapresiasi. Meski begitu, hal ini tidak terjadi secara instan. Para perempuan tersebut melalui proses panjang dan kerja keras untuk membuktikan di

masyarakat bahwa mereka bisa menjadi pemimpin. Mereka juga menyusun strategi yang matang untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam struktur koperasi.

Sebelum pelaksanaan musyawarah desa, ketua PKK setempat mengadakan pertemuan khusus dengan semua kelompok perempuan untuk menyusun strategi. "Mama desa (istri kepala desa) ajak kita kumpul untuk diskusi rencana yang harus kita buat supaya perempuan bisa masuk jadi pengurus KMP," ungkap salah satu pengurus. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati nama-nama calon berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk pengurus KMP.

Mama desa bercerita, "Saya yakin mereka bisa terpilih karena semua persyaratan yang ada telah mereka miliki, seperti kemampuan dasar perkoperasian, kerja sama, dan kemampuan komunikasi. Ini hal-hal yang sudah mereka dapat di kelompok VSLA dan Sekoper.

Dalam pertemuan tersebut, kelompok juga berbagi peran untuk melakukan lobi dengan kepala dusun, ketua RT, ketua RW, hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar bisa mendukung perempuan menjadi pengurus KMP. Mama desa akan melobi kepala desa sekaligus akan minta bantuan Kades untuk menggalang dukungan dari peserta musyawarah lain.

"Saya minta bapa desa untuk bantu lobi RT, RW, dan dusun. Saya bilang ini perempuan memenuhi syarat," lanjut mama desa.

Menurut kelompok, saat melobi, hampir semuanya mendukung. Namun, ada pula yang belum mendukung saat pemilihan. "Mungkin mereka masih ragu karena kami perempuan," ungkap mama Tanti, salah satu pengurus.

Strategi tersebut terbukti efektif. Dukungan dari kepala desa semakin memperkuat posisi perempuan dalam pencalonan KMP. Kepala desa menjelaskan, "Sejak masuknya Program WE NEXUS, kami sebagai aparat desa dapat cara pandang baru tentang pentingnya melibatkan perempuan dalam kegiatan di desa. Sebenarnya aturan sudah ada, tetapi selama ini masih sulit diterapkan karena mengubah budaya itu tidak gampang. Perempuan di desa kami sangat aktif dua tahun terakhir ini. Mereka juga punya kelompok-kelompok seperti VSLA, jadi mereka ada pengalaman urus koperasi. Itu salah satu syarat penting. Apalagi VSLA berhasil," ungkapnya.

Selain dukungan masyarakat, dukungan keluarga juga sangat berperan. Para suami memberikan izin, menjaga anak, bahkan melakukan pekerjaan rumah tangga ketika istri mengikuti kegiatan di desa maupun di luar desa. "Suami dukung saya ikut kelompok VSLA dan Sekoper. Dia bilang itu kegiatan baik untuk bikin perempuan

maju. Suami sekarang mau jaga anak dan masak," ungkap salah seorang pengurus.

Perubahan ini juga berkaitan dengan konteks kebijakan nasional. Koperasi Merah Putih adalah program prioritas pemerintah yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Kisah perempuan di desa ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat terjadi ketika ada ruang, dukungan, dan strategi yang tepat. Dari yang semula terpinggirkan dalam budaya patriarki, kini perempuan mampu tampil sebagai penggerak pembangunan desa.

# 9

## Alokasi Dana Desa untuk Pembentukan Kelompok VSLA di Enam Dusun

**M**elianus, salah satu kepala desa di Kabupaten Kupang suatu waktu mengatakan, "saat ini, kami pemerintah desa harus mendengar suara perempuan. Adat dan kebiasaan selama ini, perempuan selalu dianggap orang nomor dua, sehingga memberikan pendapat tapi tidak didengar. Tapi saya mau canangkan agar suara perempuan itu harus didengar, tidak hanya khusus untuk memasak dan lain-lain, tapi suara perempuan juga harus ada di dalam forum-forum desa yang mana mereka harus dilibatkan. Semua forum kelompok perempuan di desa ada SK (Surat Keputusan) Kepala Desa."



*Foto: Melianus, salah satu kepala desa di Kabupaten Kupang.*

Hal tersebut dikatakan Melianus saat diminta pendapatnya tentang alasannya mengalokasikan dana desa sebesar Rp40.000.000 dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun 2026 untuk pembentukan Kelompok Simpan Pinjam Desa (VSLA) di enam dusun dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Kelompok VSLA di desa ini dibentuk pada bulan November 2024. Sebelum pembentukan VSLA, Forum Perempuan Desa dan Pokja Perdamaian berembuk untuk mengutus tiga orang anggotanya mengikuti pelatihan pembentukan VSLA di Kota Kupang. Mereka bertiga mengikuti pelatihan selama tiga hari.

"Kitong (kita/kami) sangat tertarik dengan apa yang diajarkan tentang pengelolaan keuangan seperti memisahkan uang kebutuhan sehari-hari, dana jaga-jaga (darurat), biaya pendidikan anak, dan menabung. Kitong jadi tahu cara atur uang," ungkap Dewi, salah satu peserta.

"Beta (saya) tertarik untuk membentuk kelompok VSLA di desa karena akan membantu mama-mama. Cukup banyak mama-mama yang meminjam uang di koperasi harian dengan bunga tinggi," tambahnya. Bunga pinjaman di koperasi harian bisa mencapai 20 persen per bulan, sementara pinjaman di VSLA tidak dikenai bunga, hanya biaya administrasi yang jumlahnya hanya sekitar satu persen dari total pinjaman.

Setelah pelatihan, dilakukan sosialisasi tentang VSLA saat pertemuan Forum Perempuan pada bulan Desember 2024 di aula kantor desa. Seluruh peserta yang hadir sejumlah 20 orang setuju untuk membentuk kelompok VSLA. Menurut mereka, VSLA bagus karena menyimpan uang sendiri dan bisa pinjam dengan biaya rendah.

VSLA juga mengedepankan nilai kejujuran. Hal ini terlihat dari pembagian peran dalam keanggotaan. Brankas tabungan dipegang oleh salah seorang anggota dan setiap pertemuan dilakukan di rumahnya. Brankas tabungan berbentuk kotak kecil yang dikunci dengan tiga gembok. Masing-masing kunci gembok dipegang oleh tiga orang anggota berbeda.

Saat pembentukan VSLA, masing-masing anggota diminta menyebutkan mimpi mereka sebagai bentuk motivasi. Ada yang ingin membeli kursi, menambah usaha kios, hingga membeli perabot dapur. Meski begitu, memasuki bulan kedua, terdapat dua anggota VSLA yang mengundurkan diri karena rumah mereka jauh dari tempat pertemuan, berjarak sekitar lima kilometer, sementara mereka tidak memiliki kendaraan. Mereka mengusulkan agar kelompok VSLA dibentuk di dusun. Usulan ini pun ditampung.

Kini VSLA mulai berjalan dengan baik. Mama-mama rajin menabung dan selalu hadir saat pertemuan. Ada anggota yang meminjam uang untuk membayar uang sekolah anak dan membiayai anak yang mengikuti tes masuk tentara. Pengembalian pinjaman pun lancar.

Ester, salah satu anggota, menyampaikan, "Saat pertemuan VSLA, kitong juga berbagi pengalaman sampai masalah-masalah yang dihadapi mama-mama, bagaimana cara supaya jangan malu saat baomong (bicara) di depan banyak orang. Jadi sonde (tidak) hanya omong VSLA saja."

Memasuki bulan keenam, beberapa pengurus VSLA melakukan sosialisasi VSLA ke semua dusun. Sosialisasi dilakukan saat kegiatan Posyandu. Apa yang disampaikan disambut baik oleh mama-mama yang hadir.

Saat ini kelompok VSLA telah memasuki periode kedua dengan penambahan anggota sebanyak enam orang. Saat periode pertama, uang simpanan terkumpul mencapai lebih dari Rp12.000.000. Saat ini, hampir semua anggota VSLA tidak lagi meminjam di koperasi harian yang berbunga tinggi.

Keinginan membentuk kelompok VSLA di semua dusun menjadi salah satu usulan prioritas saat pelaksanaan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Pada bulan November 2025, kelompok bersepakat untuk memperjuangkan usulan ini agar masuk prioritas dalam Musrenbang Desa. Harapannya, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk pembentukan VSLA di semua dusun.

Hasil MKP disampaikan oleh perwakilan Forum Perempuan yang mengikuti Musrenbangdes. Selain penyampaian di forum Musrenbangdes, anggota forum juga

meminta dukungan dari ketua RT, ketua RW, kader desa, kepala dusun, dan pemerintah desa.

"Kami pemerintah desa lihat kegiatan VSLA ini sangat baik. Anggota bisa tabung uang dan pinjam uang dengan bunga rendah. Istri saya juga ada di kelompok VSLA. Dia cerita kalau mama-mama yang rajin menabung dapat manfaat untuk bayar uang sekolah anak dan mulai berani bicara di depan umum. Mama-mama di dusun lain punya kerinduan untuk masuk kelompok VSLA tapi jauh," ungkap sekretaris desa.

Ia melanjutkan, "Saya lihat awal-awal, mama-mama bicara malu-malu, takut, karena mungkin pikir, 'Oh nanti laki-laki selalu bantah atau selalu cut (potong pembicaraan). Dengan kegiatan ini, karena sudah dibekali, mereka juga sudah punya keberanian untuk bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. Bentuk VSLA di desa ini sesuai dengan kebutuhan yang mereka rasakan, bukan berdasarkan keinginan."

# 10

## **Musyawarah Khusus Perempuan (MKP): Jembatan bagi Partisipasi Bermakna Perempuan dalam Musrenbang Desa**

**R**endahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, khususnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa), terjadi di salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Padahal jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki

Dalam diskusi bersama Forum Perempuan pada 23 November 2025, mereka menyampaikan beberapa permasalahan penting terkait partisipasi perempuan dalam Musrenbang, yaitu:

1. Sekitar 70% anggota Forum Perempuan yang dibentuk oleh program WE NEXUS belum pernah mengikuti Musrenbangdes.
2. Perempuan yang mengikuti Musrenbangdes jarang berbicara karena kegiatan masih didominasi laki-laki.
3. Perempuan belum memahami hak partisipasi.



Foto: Dua anggota Forum Perempuan terlibat dalam sesi diskusi dalam program WE NEXUS.

4. Perempuan merasa malu dan tidak percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang.
5. Belum semua aparat desa memahami pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan partisipasi perempuan hanya bersifat formalitas dan belum sungguh-sungguh bermakna.

"Pembentukan kelompok seperti Forum Perempuan, Sekolah Perempuan (Sekoper), Pokja Perdamaian Desa, Kelompok Simpan Pinjam Desa (VSLA) hingga berbagai pelatihan dan diskusi merupakan strategi yang baik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Perempuan didorong berorganisasi, belajar bersama, membangun solidaritas untuk saling mendukung dan menciptakan ruang

aman untuk berbagi pengalaman sehingga berani untuk berbicara di depan banyak orang," ungkap Norin Sinta Alle, staf Yayasan CIS Timor Indonesia untuk Program WE NEXUS.

Dalam diskusi grup terpumpun (FGD) bersama anggota Forum Perempuan, para anggota menceritakan kegiatan mereka. Salah satu pelatihan yang diingat oleh mama-mama yaitu pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada April 2025. "Kami dilatih cara petakan masalah, analisis masalah perempuan, dan bagaimana cara berbicara di depan banyak orang. Kami jadi lebih tahu supaya usulan diterima dalam Musrenbang harus banyak orang yang usul," ungkap Blandina dengan semangat.

Pada akhir pelatihan, kelompok berencana untuk membuat Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) sebagai forum persiapan sebelum masuk dalam Musrenbangdes. "Tujuan MKP supaya kita perempuan sendiri siap diri untuk bicara kita punya masalah dan kebutuhan yang mau kita usul dalam Musrenbang supaya kita tidak gugup dan tidak malu," jelas Yesy.

Forum Perempuan menjadi penggerak dalam pelaksanaan MKP. Mereka berdiskusi tentang proses pelaksanaan, pembagian tugas, dan memutuskan siapa pemimpin MKP. MKP diikuti juga oleh perempuan anggota/peserta Sekoper, VSLA, Pokja Perdamaian, kader Posyandu, PKK desa, dan perwakilan perempuan dari dua dusun.

MKP pertama di desa ini dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, terdapat beberapa kebutuhan perempuan yang dipetakan berdasarkan wilayah dusun. Usulan dusun pertama antara lain pembentukan kelompok tani perempuan, bantuan bahan tenun ikat, pemasaran produk lokal, bantuan bibit sayur, sosialisasi perlindungan perempuan dan anak, dan penambahan jumlah kelompok VSLA. Sementara itu, usulan dusun kedua antara lain tentang penerbitan aturan tentang ketertiban umum, pelatihan pembuatan minyak kemiri dan kerajinan tangan, pelatihan tata busana dan tata rias, pelatihan pembuatan garam, pelatihan pengelolaan makanan lokal, dan penambahan jumlah kelompok VSLA.

Setelah pemetaan selesai, proses dilanjutkan dengan pengurutan prioritas usulan yang akan dibawa ke Musrenbangdes. Tiga usulan prioritas untuk Musrenbang dihasilkan melalui voting, yaitu bantuan bahan tenun ikat, bantuan bibit sayur, dan pelatihan tata busana dan tata rias.

Pada sesi akhir MKP, dilakukan pembagian peran sebagai rencana tindak lanjut. Ada yang mewakili untuk menyampaikan hasil MKP dalam Musrenbangdes, ada pula

yang melobi kepala desa, kepala dusun, ketua RT, hingga ketua RW agar usulan dari MKP masuk dalam prioritas.

Usulan dari MKP disampaikan dalam Musrenbangdes pada Oktober 2025. Selain penyampaian usulan, kelompok juga mempersiapkan proposal yang langsung disampaikan ke pemerintah desa. Usulan yang diterima dan masuk dalam usulan prioritas desa yaitu pemberian bantuan bibit sayur untuk petani perempuan dan pelatihan pembuatan garam.

"Dua usulan diterima berdasarkan potensi desa. Ada wilayah di bagian gunung yang cocok untuk tanaman sayur dan bagian pantai yang cocok untuk pembuatan garam," kepala desa.

Dalam diskusi grup terpumpun, mama-mama menyampaikan banyak pelajaran penting dari MKP, antara lain:

1. MKP merupakan pengalaman pertama di desa bagi perempuan untuk bisa menyampaikan kebutuhan secara lengkap.
2. Perempuan sangat bangga karena usulan diterima dalam Musrenbangdes.
3. Perempuan kini lebih memahami proses Musrenbangdes termasuk cara menentukan kebutuhan prioritas.
4. Perempuan bisa belajar berbicara di depan banyak orang sehingga tidak gugup dan malu.
5. Perempuan bisa belajar cara pendekatan dengan tokoh-tokoh di desa agar mendukung usulan perempuan.

"Dengan masuknya program WE NEXUS, perempuan semakin maju. Mereka tidak seperti dulu. Sekarang kalau ada undangan dari pemerintah desa seperti Musrenbangdes, mereka selalu hadir 30 menit sebelum kegiatan berjalan dan berani baomong (bicara) di forum. Meskipun belum semua, ini contoh yang sangat baik," ujar ketua BPD setempat.

"Pemerintah desa sangat mendukung kegiatan-kegiatan kelompok perempuan di desa. Saya pantau mereka mulai berani bicara di forum desa, tidak malu-malu seperti dulu. Kami juga mendukung pelaksanaan MKP. Ke depannya, MKP akan dilaksanakan secara reguler di desa sebelum Musrenbang," ungkap kepala desa.

# 11

## Dana Desa untuk Akses Aman Ibu Melahirkan

**D**i salah satu desa di Kabupaten Kupang, pemerintah telah menetapkan bahwa ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Layanan ini sebenarnya gratis bagi warga yang memiliki BPJS. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua ibu hamil dapat mengakses layanan tersebut. Hambatan utama yaitu biaya transportasi yang tinggi, jarak yang jauh, serta kondisi jalan yang sebagian rusak. Situasi ini membuat sebagian ibu hamil tetap melahirkan di rumah atau bahkan dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu dan bayi.



*Foto: Para anggota Forum Perempuan terlibat dalam sebuah sesi diskusi dalam program WE NEXUS.*

Pengalaman pahit ini pernah dialami oleh Monika, anggota Forum Perempuan. Ia mengenang kejadian pada April 2019 ketika melahirkan anak pertamanya di tengah perjalanan menuju fasilitas kesehatan terdekat yang berjarak sekitar 19 km dari desanya. Ia harus menunggu kendaraan cukup lama di tengah kondisi jalan yang rusak. Saat itu, kendaraan yang tersedia sangat terbatas.

"Jika menggunakan mobil pickup harus membayar Rp500.000, pulang pergi," ungkapnya. Mobil pickup — kendaraan untuk angkut barang tetapi dimodifikasi untuk mengangkut penumpang — menjadi satu-satunya pilihan transportasi. Hingga kini, tingginya biaya transportasi tetap menjadi kendala utama bagi masyarakat, khususnya keluarga tidak mampu.

Masalah ini kemudian menjadi perhatian serius. Pada April 2025, Program WE NEXUS menyelenggarakan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PRRG) bagi Forum Perempuan. Dalam pelatihan tersebut, peserta melakukan pemetaan masalah desa dan salah satu isu utama adalah tingginya risiko kematian ibu saat melahirkan akibat keterbatasan akses transportasi ke fasilitas kesehatan. Melalui proses diskusi, peserta sepakat bahwa kebutuhan mendesak yang harus diperjuangkan dalam Musrenbangdes adalah dukungan transportasi bagi ibu hamil dan warga sakit menuju fasilitas kesehatan.

Salah satu materi penting yang membekas dalam ingatan peserta adalah tentang advokasi dana desa. Samalina mengingat dengan jelas pesan dari fasilitator, "Kitong (kita) ingat dalam pelatihan PRRG, fasilitator mendiang ibu Ningsih ajar kalau dana desa itu dari pajak masyarakat, termasuk pajak perempuan. Saat beli beras, bedak, handbody, lipstik, dan lain-lain, ada pajak." Pemahaman ini membuka kesadaran

baru bahwa perempuan memiliki kontribusi dalam pajak sehingga mereka juga berhak menikmati manfaat dari dana desa.

Namun selama ini musyawarah desa lebih didominasi laki-laki sehingga kebutuhan spesifik perempuan sering tidak terakomodasi. Berbekal pengetahuan tersebut, pada akhir pelatihan, dibuat rencana tindak lanjut untuk menyusun strategi advokasi agar perempuan hamil yang akan melahirkan bisa dapat bantuan dana transportasi dari desa. "Kitong (kita) semua setuju untuk dorong agar ada dana desa untuk bayar sewa pickup ibu yang mau melahirkan," jelas Meldi.

Forum Perempuan menyepakati bahwa mereka harus solid dalam menyuarakan usulan utama, yaitu alokasi dana desa untuk biaya transportasi ibu hamil yang akan melahirkan. Mereka berbagi peran untuk melakukan pendekatan ke ketua RT, ketua RW, kepala dusun, kader PKK, dan warga yang mengikuti Musrenbang di dusun dan desa. "Kitong semua dapat tugas pendekatan, supaya kalau buat perankingan na kitong pung usulan dapat dukung banyak suara," ungkap Yane menjelaskan lobi yang mereka lakukan saat itu dengan penuh semangat.

Upaya ini membuahkan hasil. Masyarakat memberikan respons positif dan bersedia mendukung usulan tersebut. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini banyak usulan tidak berbasis kebutuhan nyata sehingga tidak mendapat prioritas. "Kalau soal makan dan minum, kitong di desa ada makanan jadi tidak menjadi masalah. Persoalannya masyarakat tidak punya uang ke Puskesmas," kata Sariyanti penuh semangat.

Kaur Perencanaan membenarkan apa yang disampaikan oleh kelompok perempuan. "Sejak tahun 2025-2026, pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk biaya transportasi bagi ibu hamil yang akan melahirkan sebanyak Rp500.000. Alokasi dana ini disampaikan oleh perwakilan Forum Perempuan dan banyak dapat dukungan dari RT, RW, dusun dan perwakilan masyarakat sehingga masuk dalam perankingan." Ia juga menambahkan bahwa perempuan di desa kini mulai aktif bersuara, tidak seperti dulu. "Sekarang mama-mama kalau omong di desa seperti Musrenbang sonde (tidak) malu-malu seperti dulu. Sekarang mereka seperti lebih berani," ungkapnya.

Meskipun implementasinya masih dalam tahap awal, sudah ada informasi bahwa beberapa warga mulai memanfaatkan bantuan tersebut.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki akses terhadap pengetahuan, ruang partisipasi, dan keberanian untuk bersuara, mereka mampu

mendorong perubahan nyata dalam pembangunan desa. Kisah ini menjadi contoh bahwa pemberdayaan perempuan melalui pengetahuan dan advokasi dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran. Perjuangan ini bukan hanya tentang transportasi, tetapi tentang memastikan bahwa setiap warga, khususnya perempuan, memiliki akses terhadap layanan dasar yang menyelamatkan nyawa.

# 12

## Perempuan Masuk Tim Ranperdes

**S**amalina merupakan salah satu perempuan penggerak di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Ia aktif di Forum Perempuan, Kelompok VSLA, dan Pokja Perdamaian. Menurutnya, perempuan sering hadir dalam forum tetapi tidak benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.



*Foto: Samalina berbicara penuh percaya diri dalam sebuah sesi diskusi dalam program WE NEXUS.*

"Sebelum program WE NEXUS masuk desa, kami perempuan dan kaum muda jarang ada (dalam rapat desa). Kalau hadir dalam musyawarah pun biasanya hanya hadir untuk memenuhi kuota, tapi untuk bersuara, lebih banyak (datang) dari laki-laki yang lebih tua," ungkapnya. "Saya pernah menjadi anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) 2017-2020, tapi suara tidak didengar, saya seperti boneka," lanjut Samalina.

Perempuan lebih sering ditempatkan di ranah domestik. Ketika hadir dalam rapat desa, mereka cenderung berada di "belakang" — menyediakan konsumsi, bukan menyampaikan pendapat. Dalam situasi seperti ini, suara perempuan hampir tidak terdengar, termasuk dalam isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan mereka, seperti akses air bersih, kesehatan, hingga perlindungan anak dan perempuan.

Perubahan mulai terjadi ketika program WE NEXUS hadir di desa sejak tahun 2024. Kelompok perempuan dibentuk dan mendapatkan penguatan kapasitas. Program ini membuka ruang pelatihan, diskusi, sosialisasi tentang kesetaraan gender, perdamaian, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan desa. Pemerintah desa juga mendapat penguatan kapasitas untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam kegiatan di desa.

Tahun 2025, desa ini membuat Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Kewenangan Desa. Ranperdes mengatur beberapa hal penting yaitu perlindungan mata air, larangan hidup bersama sebelum menikah, penjatuhan sanksi adat, kasus percabulan, kasus kekerasan terhadap anak, dan penertiban ternak.

Samalina mengingat kembali momentum saat ia dipilih sebagai salah satu anggota tim sosialisasi Ranperdes tentang Kewenangan Desa pada bulan September 2025. "Saat di forum mereka bilang harus ada perwakilan dari perempuan. Ini (perubahan) semenjak kesetaraan gender disosialisasikan di desa," ungkapnya.

Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah di kantor desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, ketua RW, ketua RT, kepala dusun, tokoh adat, dan tokoh agama. Dua orang perempuan terpilih sebagai perwakilan masyarakat dan disetujui oleh semua peserta musyawarah yang mayoritas adalah laki-laki.

"Selama ini bila menyebut perwakilan masyarakat, umumnya yang dipilih adalah laki-laki karena tokoh masyarakat di desa paling banyak laki-laki," ungkap Samalina.

Kepercayaan kepada perempuan untuk masuk dalam tim sosialisasi Ranperdes disampaikan juga oleh Kaur Perencanaan Desa. "Saat pemilihan hampir semua yang hadir setuju untuk memilih dua orang perempuan yang mewakili masyarakat. Persetujuan ini karena ada aturan tentang kuota perempuan. Mereka juga perempuan yang mampu dan aktif di desa. Sekarang pemerintah desa sampai masyarakat mulai sadar tentang gender," ungkapnya.

Frans, salah satu tokoh adat setempat, mendukung pernyataan Kaur Perencanaan tersebut. "Saya ikut kegiatan Yayasan CIS Timor Indonesia sudah tiga kali. Dulu sebelum ada program ini, perempuan hanya tugas di dapur. Mau dia sekolah setinggi apapun dia akan kembali di dapur. Jadi tugas utama mereka di dapur masak untuk anak dan suami. Tetapi setelah ada program ini, cara pandang kami diubah, bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki, bukan lebih rendah. Sekarang perempuan bisa ada dan bicara dalam rapat desa," ungkapnya.

Bagi Samalina, terpilih hingga dipercaya untuk masuk dalam tim sosialisasi bukan hanya memunculkan tanggung jawab, tetapi juga kebanggaan. Apalagi di dalam tim hanya ada empat perempuan (termasuk satu Ketua RT dan satu aparat desa), sementara laki-laki mencapai 14 orang. Sebagai perempuan pendatang, Samalina bangga. "Saya rasa bangga, ternyata kami orang pendatang, karena sudah ada perubahan pola pikir, kami jadi dipercaya."

Dalam perannya sebagai tim sosialisasi, Samalina terlibat dalam proses sosialisasi Ranperdes di empat dusun. Ia tidak hanya hadir, tetapi juga aktif dalam diskusi bersama masyarakat. "Saat diskusi, kita bahas lebih ke kekerasan terhadap anak. Selain itu, saya ikut bahas tentang percabulan karena sering terjadi di desa," ujarnya. Salah satu topik prioritas adalah tentang kasus percabulan anak dan praktik hidup bersama tanpa pernikahan. Sebelumnya, masalah ini diselesaikan secara tertutup dalam keluarga. Masukan dari masyarakat dicatat dan sudah dimasukkan dalam perubahan Ranperdes.

Bagi Samalina, dukungan keluarga menjadi faktor penting. Suaminya menyatakan, "Saya tidak batasi istri punya ruang gerak karena yang dia buat itu barang baik, jadi

tidak apa-apa."

Setelah sosialisasi Ranperdes, mulai ada sedikit perubahan walaupun peraturan desa belum diberlakukan. "Barenti (berhenti) pukul anak, ko mau kena denda," ucap Samalina meniru apa yang ia dengar. Samalina berharap akan ada perubahan yang lebih baik di desa saat Ranperdes akhirnya ditetapkan menjadi Perdes.

# 13

## “Adik Perempuan Saya Harus Jadi Sarjana”

**S**alah satu kelompok perempuan di desa ini sangat bersemangat ketika bercerita tentang VSLA (Village Savings and Loan Association) atau kelompok simpan pinjam desa. Banyak cerita bahwa mereka tidak lagi meminjam di koperasi harian berbunga tinggi, mendapat bantuan untuk usaha kios, meminjam untuk kebutuhan sekolah anak, serta membeli perabotan rumah tangga saat pembagian tabungan di akhir tahun. Mereka juga sangat senang karena ada penambahan 15 anggota baru VSLA.



*Foto: Marcela berbicara serius dalam sebuah sesi wawancara pada program WE NEXUS.*

Marcela (32) menyampaikan salah satu cerita menarik dan mengharukan. Ia anak keempat dari tujuh bersaudara. Ada yang sudah bekerja, ada yang belum, dan ada pula yang masih kuliah. Marcela sendiri bekerja sebagai pedagang dengan membuka kios barang keperluan sehari-hari.

Marcela menempuh pendidikan SD sampai tamat SMA di Kabupaten Kupang. Menjelang tamat SMA, ia mengikuti seleksi jalur prestasi dan diterima di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Nusa Cendana (Undana) di Kota Kupang. Persaingan masuk ke FIA Undana cukup ketat karena menjadi salah satu fakultas favorit dan universitas negeri satu-satunya di NTT pada saat itu.

Sayangnya, keinginan Marcela melanjutkan pendidikan kandas karena pada tahun yang sama kondisi ekonomi keluarga berubah. "Saya sangat sangat sedih tapi harus menerima kenyataan (...). Tidak mungkin bisa bayar uang kuliah, kamar kos, transport, makan-minum dan biaya lainnya," kenang Marcela sembari menangis.

Marcela termasuk perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan di desa. Ia menjadi kader Posyandu serta pengurus VSLA dan Forum Perempuan. Ia mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut. "Kita lebih tahu tentang hak perempuan, dulu malu omong di depan banyak orang, sekarang tidak lagi. Kita diundang dalam rapat desa. Dalam kelompok, kita bisa bagi pengalaman dan dapat jalan keluar. Di desa, perempuan kini jadi lebih dihargai," jelasnya.

Sebagai anggota VSLA, manfaat yang ia rasakan ialah bisa menabung sekaligus meminjam uang dengan bunga rendah untuk menambah usaha kios. Besaran bunga pinjaman ini adalah salah satu kesepakatan anggota VSLA. Sebelum bergabung dengan VSLA, kalau ia butuh uang mendadak, biasanya meminjam di koperasi harian. "Bunganya sangat tinggi, sampai 20 persen 1 bulan. Beda dengan VSLA (kami), bunganya rendah hanya 2,5 persen tiap bulan dan bisa cicil hingga

empat bulan," lanjutnya.

Salah seorang adik Marcela saat ini sedang kuliah semester akhir. Biaya kuliahnya cukup besar karena meliputi uang semester, biaya hidup harian, transportasi, dan biaya lain. Biasanya setiap dua pekan sekali, adiknya akan kembali ke rumah untuk mengambil perbekalan dari kiosnya. "Saya senang karena bisa bantu orang tua lihat adik yang kuliah," lanjut Marcela dengan tersenyum.

Dalam kelompok VSLA ini, mereka melakukan pembagian uang tabungan dan sisa hasil usaha pada akhir siklus atau bulan ke-12 sejak dimulai. Mereka senang karena bisa mewujudkan rencana sejak awal menabung atau bisa memenuhi kebutuhan mendesak. Marcela sendiri menggunakan uang tabungannya untuk menggenapi pembayaran biaya semester kuliah adiknya.

"Saya yakin ini cara Tuhan, saya dapat tabungan di saat yang pas (tepat). Jadi adik nona butuh uang kuliah saya bisa bantu," ungkapnya. "Usaha kios, tabungan saya pakai selama ini untuk tambah biaya kuliah adik dan biaya hidup. Adik perempuan saya harus jadi sarjana supaya masa depannya lebih baik dari saya."

Menurut Marcela, kontribusinya dalam ekonomi keluarga mendapat apresiasi dari keluarga besar dan tetangga. Suaranya sebagai anak perempuan lebih didengar dalam pengambilan keputusan.

"Kalau mau buat apa saja, seperti kasih sumbangan orang meninggal, menikah, atau kebutuhan lain, saya selalu ditanya, minta saya punya pendapat. Kalau ada pertemuan keluarga besar, mereka suka bilang 'Marcela kamu hebat bisa bantu orang tua dan adik-adik,'" ungkap Marcela bangga.

Kisah Marcela menunjukkan jika perempuan kuat secara ekonomi, ia akan berdaya secara sosial dan suaranya akan lebih diperhitungkan. Kelompok VSLA pada akhirnya tidak hanya memperkuat perempuan secara ekonomi, tapi juga memperkuat posisi mereka di keluarga dan masyarakat.



# 14

## VSLA: Dompet Terpisah, Keluar dari Jeratan Utang

**A**wal 2026 menjadi momen penting berbagi pengalaman bagi mama-mama di salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Mereka berkumpul dan berbagi cerita tentang perubahan yang mereka alami sejak bergabung dalam kelompok VSLA (Village Savings and Loan Association) atau kelompok simpan pinjam desa — khusus perempuan. Perubahan itu tidak hanya soal uang, tetapi juga cara berpikir, relasi dalam keluarga, hingga keberanian mengambil keputusan.



Foto: Pelatihan dan Pembentukan Kelompok VSLA di salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Perjalanan ini bermula pada akhir Desember 2024, ketika tiga perempuan dari desa ini mengikuti pelatihan di Kupang. "Permintaannya hanya tiga orang, jadi saya usulkan ke pemerintah desa kalau bisa ada keterwakilan dari unsur pendidikan, dari kerohanian, dan juga dari gereja," tutur Lia\*, salah satu perwakilan. Mereka mengikuti pelatihan fasilitator selama beberapa hari meski awalnya belum sepenuhnya memahami apa yang akan mereka lakukan.

Sepulang dari pelatihan, mereka mulai bergerak. Pada Februari 2025, kelompok VSLA resmi dibentuk dengan 24 anggota dan diberi nama Hidup Baru. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan sebulan sekali dan mulai menabung dari sisa uang yang dimiliki. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Tidak semua masyarakat memahami konsep VSLA.

Winda ingat betul bagaimana mereka menghadapi stigma dari lingkungan sekitar. "Dibilang kami orang gila karena kami super sibuk, padahal pertemuan-pertemuan kami itu mereka tidak tahu," katanya.

Banyak yang mengira kelompok ini sudah memiliki dana besar untuk dikelola, padahal prinsipnya justru menabung dari uang sendiri, sekecil apa pun. "Pemikiran mereka bahwa uangnya sudah ada dan tinggal dikelola, sedangkan yang kami sampaikan itu bukan uangnya, tapi kami harus bisa simpan dengan kami punya sisa-sisa uang yang ada," lanjutnya. Meski mendapat pandangan miring, mereka tetap bertahan dengan motto kelompok: Berani Mencoba, Tangguh, dan Bertahan.

Salah satu perubahan nyata dirasakan oleh Lia. Sebelum bergabung dengan VSLA, ia pernah terjebak dalam pinjaman koperasi harian berbunga tinggi. "Saya pernah pinjam di koperasi karena memang ada kebutuhan yang mendesak dan angsurannya itu setiap minggu," ujarnya. Bunga pinjaman yang tinggi membuat beban ekonomi semakin berat. "Kalau biasanya kita pinjam Rp1.000.000, bunga setiap bulan itu Rp250.000 sehingga kami terbebani," tambahya.



Foto: Brankas tabungan VSLA berbentuk kotak tertutup dengan buku tabungan VSLA di atasnya.

Setelah bergabung dengan VSLA, ia memutuskan keluar dari koperasi tersebut. Dalam kelompok, ia bisa meminjam dengan bunga rendah sesuai kesepakatan anggota, yaitu 2,5 persen per bulan.

Perubahan juga dirasakan oleh Trisna. Awalnya, ia menolak bergabung karena salah paham tentang konsep VSLA. "Saya tidak mau bergabung karena waktu saya dapat dengar, saya pikir (mereka) bilang sudah ada uang, jadi tinggal kelola saja," ujarnya. Sebagai pemilik kios, ia tidak ingin mengelola uang orang lain. Namun setelah dijelaskan oleh keluarganya, ia akhirnya bergabung. Dari situ, ia mulai memahami pentingnya menabung dan mengelola keuangan.

Salah satu perubahan paling signifikan dalam hidupnya adalah penerapan sistem 'dompet terpisah'. "Selama ini tidak pernah pisah-pisah uang. Uang kebutuhan keluarga sampai uang kios semuanya saya gabung. Terkadang barang habis, uang juga habis," ungkapnya.

Kebiasaan itu membuat usahanya tidak berkembang dan keuangan rumah tangga tidak terkendali. Kini ia belajar memisahkan uang berdasarkan kebutuhan. Ia bahkan mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari. "Saya bilang, sebenarnya uang nih kitong (kita) harus pisah. Mana kebutuhan keluarga pisah, ini uang kios juga pisah," ungkapnya.

Perubahan ini juga berdampak pada relasi dalam rumah tangga. Awalnya suami tidak memahami aktivitasnya, tetapi kini mendukung. "Sekarang dia mau ambil uang sudah takut. Dia sentuh 'Ini uang apa?' 'Ini uang kios, mau uang apa?' Jadi harus tanya di beta (saya)," katanya sambil tertawa. Ia juga menegaskan kepada suaminya, "Jadi, lu (kamu) jangan omong beta, bilang beta pi (pergi), hanya bajalan-

bajalan (jalan-jalan) saja. Jadi kitong ikut kegiatan juga ada pung (punya) manfaat."

Pengelolaan uang dengan sistem dompet terpisah juga dipraktikkan oleh anggota lain. Ada yang tidak menggunakan dompet tetapi amplop. Biasanya masing-masing amplop diisi uang untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan dapur, belanja mingguan (sabun, pasta gigi), token listrik, cicilan yang tidak bisa ditunda, air, uang sekolah anak, hingga dana darurat atau tabungan.

Secara keseluruhan, VSLA telah membawa perubahan besar bagi perempuan di desa ini. Mereka tidak hanya terbebas dari jeratan utang rentenir, tetapi juga memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, keberanian mengambil keputusan, dan berjalan menuju kemandirian ekonomi. Perempuan yang sebelumnya bergantung pada pinjaman berbunga tinggi, kini mampu mengatur keuangan sendiri. Mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam keluarga dan mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan.

Meski masih ada tantangan, seperti stigma sosial dan perbedaan pemahaman, kelompok ini terus berkembang. Mereka tidak hanya membangun sistem simpan pinjam, tetapi juga membangun solidaritas, kepercayaan diri, dan harapan baru. Dari yang awalnya dianggap 'orang gila' karena banyak berkegiatan di luar rumah, kini mereka menjadi contoh perubahan di desa. Perubahan yang dimulai dari hal sederhana dan keberanian untuk mencoba. Kini 'Hidup Baru' bukan hanya sekadar nama kelompok, tapi menjadi praktik hidup.

*\*) Nama disamarkan untuk melindungi narasumber.*





**KOICA**



**Save the Children**



Buku Dokumentasi Cerita Perubahan ini diterbitkan oleh Yayasan CIS Timor Indonesia dan Save the Children Indonesia pada tahun 2026.